STRATEGI KOMUNIKASI
MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PEWARISAN BUDAYA ACEH DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun Oleh:
Munzirwan
NIM. 05210017

Pembimbing
Dr. Alimatul Qibtiyah, S. Ag, M.Si, M.A.
NIP. 19710919 199603 2 001

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856,Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1342 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

STRATEGI KOMUNIKASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PEWARISAN BUDAYA ACEH DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: MUNZIRWAN
NIM/Jurusan	: 05210017/KPI
Telah dimunaqasyahkan pada	: Jumat, 30 Agustus 2013
Nilai Munaqasyah	: 78,8 (B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A.
NIP 19710919 199603 2 001

Penguji II,

Dra. Hj. Evi Septiani TH, M.Si.
NIP 19640923 199203 2 001

Penguji III,

Khadiq, S.Ag., M.Hum.
NIP 19700125 199903 1 001

Yogyakarta, 12 September 2013
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dahwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Munzirwan
NIM : 05210017
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
a.n. Dekan,
Ketua Jurusan
Komunikasi dan penyiaran Islam,

Dra. Hj. Evi Septiani TH, M.Si.
NIP. 19640923 1992203 2 001

Yogyakarta, 23 Agustus 2013
Pembimbing,

Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, MA.
NIP. 19710919 199601 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Munzirwan
NIM	: 05210017
Jurusan	: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Strategi Komunikasi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta**, adalah hasil karya sendiri, dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Juni 2013
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Munzirwan
NIM. 05210017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta, yaitu: Ayah Zakaria Ajad, Mama Faridah Usman, dan adik-adik saya yang saya cintai. Dan tak terlupakan Istri Saya tercinya beserta calon anak saya.

Almamater Tercinta:

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

"HIDUP SEKALI HIDUPLAH YANG BERARTI, BERARTI UNTUK DIRI SENDIRI, KELUARGA DAN ORANG LAIN"

"HIDUP ADALAH PEPERANGAN, SIAPA YANG MAJU DAN BERANI MENANTANG MARA BAHAYA AKAN MENJADI SEORANG PEMENANG, DAN BARANG SIAPA YANG MENYERAH DAN TAKUT MAKA AKAN MENJADI PECUNDANG"

"DAN KATAKANLAH KEPADA MEREKA PERKATAAN YANG BERBEKAS PADA JIWA MEREKA"
(Q. S. An – Nisa; 63)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, yang mana oleh ALLAH telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menuntut ilmu, masih diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kita masih dapat berfikir tentang nikmat-naikmat yang telah diberikan. Tidak lupa pula, salawat merangkaikan salam, mari sama-sama juga kita sanjung-sajikan kepada seorang tokoh yang telah merubah dunia ini, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yeng berilmu pengetahuan, dan yang telah mengangkat derajad kaum wanita dari lembah kehinaan ke bukit kemuliaan. yaitu seorang pemuda yang gagah perkasa, dialah baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur, dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta stafnya, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada penyusun, guna melakukan penelitian skripsi.
2. Dr.Waryono Abdul Ghafur, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta stafnya, yang telah memberikan semua pelayanan sebaik-baiknya guna penyusunan skripsi ini.

3. Dra. Evi Septiani T.H., M. Si, selaku ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta seluruh dosen yang memberikan segala macam bantuan, baik pemikiran maupun administrasi.
4. Dr. Alimatul Qibtiyah, S. Ag, M.Si, M.A., selaku pembimbing penyusunan skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Penguji I dan penguji II atas kesediaan dan keluangan waktu untuk menguji skripsi yang telah penulis susun.
6. Pimpinan dan staf UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
7. Prof. Dr. Irwan Abdullah, selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta, yang telah membantu untuk memberikan informasi dan data mengenai MAA, beserta pengurus-pengurunya.
8. Keluarga besar Bapak dan Ibu Zakaria Ajad, dan Adik-adikku yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil untuk keberhasilan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih atas semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlalu lama dalam menyelesaikan studi.

9. Istriku tercinta yang selalu mendampingi dan mendukung, baik suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. I@ Club, yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Jurusan KPI, TPA, PERMATA, ASRAMA MERAPI DUWA dan IKPMDI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimaksih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini mendapat balasan dari ALLAH SWT.

Yogyakarta, 12 Juni 2013
Penyusun,

Munzirwan
NIM. 05210017

ABSTRAK

Munzirwan. 05210017. 2005. Skripsi: ***Strategi Komunikasi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta.*** Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk studi kasus deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomologis yang mengambil lokasi di Yogyakrta, terutama di lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan mengkaji dokumen dan arsip. Analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh MAA ini memiliki sasaran utama kepada mahasiswa/i dan pelajar karena mereka merupakan generasi penerus dan atas pertimbangan bahwa mereka masih jarang bersentuhan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya Aceh. Selain itu, mereka juga termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap pengaruh budaya dari luar, sehingga strategi menjadikan mereka sasaran utama adalah tepat.

Metode dan saluran komunikasi dilakukan dengan cara dialog, ceramah, pengajian, baik formal maupun informal. Selain itu, pementasan kesenian juga dilakukan dengan tujuan tidak hanya sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang semata, namun lebih jauh lagi juga sebagai sarana pewarisan nilai-nilai budaya Aceh (*transfer of knowledge*) karena melalui kegiatan seperti itu tidak hanya syair-syair maupun gerakan-gerakan dapat dimaknai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Para aktor yang berperan dalam pewarisan nilai-nilai budaya ini umumnya terletak pada semua orang Aceh, khususnya generasi tua. Secara khusus, mereka para orang tua yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi di Yogyakarta memiliki tanggung jawab yang lebih dalam pewarisan nilai-nilai budaya Aceh ini.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Budaya Aceh, MAA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI xi

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Penegasan Judul 1

B. Latar Belakang Masalah 4

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

E. Kajian Pustaka 7

F. Kerangka Teori 12

1. Strategi 12

2. Komunikasi 13

3. Strategi Komunikasi 16

G. Metode Penelitian 21

1. Sumber Data 22

2. Metode Pengumpulan Data 22

3. Metode Analisis Data 25

H. Sistematika Pembahasan 26

BAB II: PROFIL MAJELIS ADAT ACEH (MAA) YOGYAKARTA ……. 28

A. Sejarah Berdirinya Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta ……...…..… 28

B. Visi dan Misi Organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta …….…… 32

C. Struktur Organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta ……. 35

D. Program dan Kegiatan Organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta……...….. 39

E. Tantangan Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta Ke Depan ….....…. 42

BAB III. STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PEWARISAN BUDAYA ACEH DI YOGYAKARTA ……..……..… 49

A. Pengenalan Khalayak …….…… 49

B. Penyusunan Pesan …….…..… 52

C. Metode Penyampaian Pesan ……..……. 55

D. Media Komunikasi yang digunakan …….. 59

E. Aktor dan Peranannya dalam Pewarisan ……..……. 62

BAB IV. PENUTUP ……...… 65

A. Kesimpulan ……. 65

B. Saran-saran …….…… 68

DAFTAR PUSTAKA …….……..... 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pembahasan Skripsi yang berjudul ”STRATEGI KOMUNIKASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PEWARISAN BUDAYA ACEH DI YOGYAKARTA”, maka penyusun sangat perlu memberi batasan-batasan terhadap judul tersebut, khususnya penegasan terhadap istilah yang ada di dalamnya.

1. Strategi Komunikasi

Strategi dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah rencana cermat tentang suatu kegiatan guna meraih suatu target atau sasaran. Sedangkan strategi komunikasi adalah kegiatan yang layak dikerjakan untuk melancarkan komunikasi.[1] Dalam hal ini adalah Strategi Komunikasi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta.

---

[1]Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, edisi* I (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1463.

2. Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh yang disingkat dengan MAA, adalah sebuah lembaga adat yang memiliki wewenang untuk mengurus masalah adat masyarakat Aceh yang berada di Yogyakarta. Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta merupakan bagian atau perwakilan Majelis Adat Aceh (MAA) pusat yang berada di Banda Aceh. Sebagai sebuah majelis atau lembaga formal, Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta juga menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lain, baik yang berkaitan dengan Adat dan lainnya, baik yang berada di Aceh maupun di luar Aceh.

3. Pewarisan

Dalam hal ini, pewarisan yang dimaksud adalah pewarisan kebudayaan. Menurut Hadi kusuma pengertian pewarisan adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh sipewarisnya. Sementara itu, Sudiyat mengemukakan bahwa yang dimaksuk pewarisan menurut hukum adat adalah proses penerusan dan pemindah-tanganan harta kekayaan meterial maupun non material dari generasi yang satu ke ahli pewarisnya. Sementara, Satrio mengatakan pewarisan menurut hukum BW/KUHP adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang terdiri dari hak-hak kebendaan (hak

kekayaan yaitu hak-hak erxpacht dan hak tagihan) dan juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan. Berdasarkan dari teori-teori tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud pengertian pewarisan adalah perbuatan melakukan pembagian harta kekayaan dari orang tua (pewaris) baik sesudah orang tua meninggal atau masih hidup kepada ahli warisnya menurut hukum yang berlaku.[2]

4. Budaya

Kata Budaya dalam bahasa inggris disebut ”*culture*” yang berarti kebudayaan. Kata ”kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta yang asal katanya ”*buddhayah*” yang merupakan bentuk jamak dari kata ”*budhi*” yang berarti budi atau akal. Secara harfiah kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal atau hasil karya, rasa dan cipta manusia. Menurut Hasan Shadilly, kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil karya manusia dalam hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi manusia yang berupa kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan lain-lain

[2]Sadilah Emiliana, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan Dan Perilaku Dikalangan Genarasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan tradisional Di kota Semarang Jawa Tengah*,(Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002), hlm. 39.

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.[3]

Apa yang diajarkan kepada manusia selama ini tentang kebudayaan telah membentuk suatu keyakinan bahwa kebudayaan itu merupakan *blue-print* yang telah menjadi kompas dalam perjalanan hidup manusia, ia menjadi pedoman dalam tingkah laku. Pandangan semacam ini pun telah menyebabkan peneliti merunut keberlanjutan kebudayaan itu pada ekspresi simbolik individu dan kelompok, terutama untuk melihat bagaimana proses pewarisan itu terjadi.[4]

B. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, dan perlahan-lahan, kebudayaan Aceh mulai terkikis karena pengaruh masuknya kebudayaan luar. Dengan pergeseran nilai-nilai keacehan yang terjadi, Majelis Adat Aceh (MAA) yang di singkat dengan MAA bertugas dan memiliki kewenangan untuk melestarikan kebudayaan Aceh yang sudah mulai sedikit demi sedikit terkikis dan mengalami pergeseran. Oleh karena itu, Majelis Adat Aceh (MAA) yang berpusat di Banda Aceh dan mempunyai perwakilan di

---

[3]Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cet, I, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 82-83.

[4]Irwan Abdullah, *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1.

beberapa Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah perwakilan Majelis Adat Aceh (MAA) di Provinsi D. I. Yogyakarta. Yogyakarta adalah miniatur Indonesia, setiap Budaya daerah di Nusantara ada di Yogyakarta, artinya hampir setiap Provinsi yang ada di Indonesia dapat ditemukan perwakilannya di Yogyakarta. Yogyakarta kaya akan budaya daerah.

Kebudayaan yang berasal dari Provinsi Aceh yang ada di kota Yogyakarta sangat perlu dilestarikan. Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh. Adat Aceh janganlah dibuang karena adat dapat menjunjung syariat. Penerapan dan Pewarisan Adat Aceh di luar daerah Aceh dianggap perlu dilakukan atas beberapa alasan. Pertama, agar tidak mudah terpengaruh oleh adat yang lain. Kedua, setiap orang Aceh yang berada di luar Aceh tetap melakukan dan menjalankan adat yang berasal dari daerah nya. Ketiga, dengan adanya pewarisan adat Aceh di luar Aceh, maka identitas asli tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

Pewarisan Adat Aceh di Yogyakarta, khususnya menyangkut strategi komunikasi merupakan isi pokok yang menarik untuk diteliti. Paling tidak ada tiga alasan mengapa topik ini penting diteliti. Pertama, strategi komunikasi yang diterapkan oleh suatu organisasi akan terkait dengan kondisi nyata masyarakat Aceh yang berada dalam fase modern yang sering kali tidak sejalan dengan tuntutan Adat yang kondisional.

Kedua, strategi komunikasi terkait dengan ruang kebudayaan luar Aceh, yang dalam hal ini Yogyakarta, sehingga tuntutan-tuntutan nilai menjadi berbeda. Ketiga, strategi komunikasi adat mencakup saluran-saluran komunikasi yang efektifitasnya ditentukan oleh kendala-kendala dan kesesuaian dengan kebutuhan orang Aceh, yang sesungguhnya tidak terlepas dari lingkungan budaya Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, agar lebih fokus dan terarah dengan baik, maka rumusan masalah yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah. "Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan ilmiah bagi ilmu komunikasi pada umumnya dan keilmuan dakwah islam pada khususnya mengenai strategi komunikasi Majelis adat aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan pemikiran berkaitan dengan strategi komunikasi Majelis Adat aceh (MAA) dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta, untuk pengurus di lembaga MAA Yogyakarta, dan untuk MAA perwakilan di Provinsi-provinsi lain.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung kajian pustaka yang lebih integral dan komprehensif, maka penulis berusaha melakukan telaah lebih awal terhadap pustaka ataupun penelitian terdahulu yang mempunyai relavansi dengan tema yang diteliti. Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah:

Susiana Dewi Wulandari telah melakukan penelitian dengan judul *"Strategi Komunikasi Dakwah Panti Asuhan Mabarrot Srimartani Piyungan Bantul Dalam Membina Akhlak Karimah Anak Asuh"*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi dakwah dan faktor-faktor pendukung serta penghambat Panti Asuhan Mabarrot dalam melaksanakan strategi komunikasi dakwahnya. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebagai media dalam strategi komunikasi dakwah untuk membina akhlak anak asuh berkisar pada dua demensi, yaitu penamaan rasa takwa kepada Allah, dan pengembangan rasa kemanusiaan. Kemudian dibutuhkan manajemen perencanaan komunikasi di dalam strategi komunikasi dakwah dalam membina akhlak anak-anak asuh di Panti Asuhan Mabarrot, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan non keagamaan secara efektif.[5]

Ahmad Rais juga pernah melakukan penelitian dengan judul *"Strategi Komunikasi Tim Kampanye Capres-Cawapres: Studi Kasus Strategi Komunikasi Tim Kampanye Amin-Siswono Dalam Membangun Citra Pasangan Amien Rais- Siswono Yudohusodo Pada Pemilu Presiden*

---

[5]Susiana Dewi Wulandari. *Strategi Komunikasi Dakwah Panti Asuhan Mabarrot Srimartani Piyungan Bantul Dalam Membina Akhlak Karimah Anak Asuh*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2000, hlm. (th).

2004", secara detail dijabarkan segala usaha yang dilakukan tim kampanye dalam menyusun strategi komunikasinya kepada khalayak dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait didalamnya, mulai dari kondisi komunikatorhingga pemetaan khalayak yang akan menerima pesan. Pada penelitian di sini, berdasarkan data yang didapat di lapangan, maka strategi komunikasi yang dilancarkan tim kampanye lebih menitik beratkan pada pembentukan citra Capres dan Cawapres. Sehingga berangkat dari situ seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan bertujuan membengun *positive image* komunikan (masyarakat umum) terhadap pasangan Capres dan Cawapres.[6]

Penelitian Lamin Budiarso dengan judul skripsi, "*Strategi Komunikasi Dana Sosial Rumah Zakat Indonesia DSUQ Cabang Yogyakarta"*, yang bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang meliputi komunikator, media yang digunakan, pesan yang disampaikan dan efek yang ditimbulkan dalam proses berkomunikasikan dana social

[6]Ahmad Rais. *Strategi Komunikasi Tim Kampanye Capres-Cawapres: Studi Kasus Strategi Komunikasi Tim Kampanye Amin-Siswono Dalam Membangun Citra Pasangan Amien Rais- Siswono Yudohusodo Pada Pemilu Presiden 2004*, Yogyakarta: Fisipol UGM. 2000, hlm. (th).

yang bersumber dari zakat, infak, sedekan dan wakaf oleh Divisi ZISwaf dan Publik Relation.[7]

Dilihat dari konsepnya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, yaitu sama-sama menggunakan konsep strategi komunikasi sebagai obyek yang akan ditelaahnya. Seperti kita ketahui, strategi komunikasi itu dapat diaplikasikan oleh berbagai pihak, baik individu maupun kelompok/lembaga, untuk menjalankan sejumlah misinya agar tujuan tercapai. Seperti hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, misalnya, penelitian Wulandari, Supaya program dakwah berjalan seperti yang mereka inginkan, yaitu membina akhlak karimah di kalangan anak asuh, maka strategi yang harus digunakan adalah penanaman rasa takwa kepada Allah dan pengembangan rasa kemanusiaan. Selain itu, manajemen perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan, baik yang bersifat keagamaan maupun di luar keagamaan harus dilakukan secara efektif.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Ahmad Rais, yaitu strategi komunikasi yang dilakukan oleh subyek penelitian bertujuan untuk

---

[7]Lamin Budiarso, *Strategi Komunikasi Dana Sosial Rumah Zakat Indonesia DSUQ Cabang Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 1999, hlm. (th).

membentuk *image* positif pasangan calon presiden Amien Rais- Siswono Yudohusodo untuk mempengaruhi para calon pemilih. Dalam kasus yang lain, berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, Budiarso justru lebih melihat pada efek yang ditimbulkan dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta melalui program Dana Sosial-nya. Di sini, ia menguraikan efek-efek yang ditimbulkan dalam proses mengkomunikasikan dana sosial yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Divisi ZISwaf dan *Public Relation*.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama berbicara mengenai strategi komunikasi. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena, berbeda dengan penelitian terdahulu, berbicara mengenai strategi komunikasi untuk mengangkat nilai-nilai yang ada dalam adat/tradisi, dalam hal ini oleh Majelis Adat Aceh (MAA) di Yogyakarta serta mengenalkan kembali nilai-nilai tersebut kepada masyarakat Aceh yang ada di Yogyakarta. Dalam hal ini, strategi yang digunakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) bukan untuk membangun citra (*image*) seperti dalam penelitian Ahma Rais, juga bukan untuk melihat efek yang ditumbulkan dari sebuah program yang telah dibuat. Strategi komunikasi dalam penelitian ini adalah strategi-strategi komunikasi yang

dilakukan untuk menggali, mengangkat, dan mensosialisasikan nilai-nilai yang telah ada (adat/tradisi) yang berbeda dengan strategi komunikasi yang diciptakan untuk membangun citra pasangan calon presiden maupun produk sebuah perusahaan.

Dilihat dari *strategi* penelitiannya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susiana Dewi Wulandari, yaitu sama-sama berbicara untuk mengangkat *tradisi* yang sudah ada, yaitu akhlak karimah di satu sisi dan adat/tradisi Aceh di sisi yang lain yang bertujuan membina akhlak para anak asuh melalui sejumlah strategi yang diciptakan maupun mengenalkan nilai-nilai tradisi/adat Aceh kepada masyarakat Aceh di Yogyakarta supaya dapat diterapkan (*applied*) dalam kehidupan sehari-hari.

F. Kerangka Teori

Selanjutnya , ada beberapa kerangka teori yang digunakan sebagai analisis oleh penulis, guna untuk menjawab permasalahan diatas, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strata” yang artinya “*pasukan, ageni-abgenis”* yang berarti pemimpin. Jadi strategi komunikasi pada awalnya berhubungan dengan pasukan perang.

Namun pada perkembangan selanjutnya, istilah strategi tidak hanya digunakan dalam hal peperangan atau bidang militer saja, melainkan berkembang dalam berbagai disiplin keilmuan seperti, bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya serta bidang komunikasi tentunya, dan masih banyak bidang keilmuan lain yang juga membutuhkan strategi.[8]

Dengan demikian ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah tertentu yang menghasilkan strategi guna mencapai tujuan. Kata strategi dapat munujukkan berbagai arti, antara lain: "rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus". Pendapat lain dikemukakan oleh Anwar Arifin bahwa, strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang apa yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan.[9]

2. Komunikasi

Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam

---

[8]Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1978), hlm. 24.

[9]Anwar Arifin, Strategi Komunikasi: *Sebuah Pengantar Ringkas*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 59.

komunikasi itu adalah manusia. Karena itu komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah *komunikasi manusia* atau dalam bahasa asing *human communication*. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan kerena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat terjadinya komunikasi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit dua orang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penjalinnya.[10]

Komunikasi sebagaimana didefinisikan oleh Claude Shannon dan Werren Weaver, merupakan penyampaian informasi, ide, perasaan (emosi), keahlian dan sebagainya, melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, bentuk, grafik, dan sebagainya.[11]

Komunikasi merupakan aktivitas yang sangat penting, dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk di dunia, terutama manusia. Karenanya, tidak salah apabila dikatakan bahwa sejarah komunikasi sama tuanya dengan sejarah umat manusia dan akan terus ada sampai akhir masa. Begitu pentingnya komunikasi bagi manusia, sehingga ada yang

---

[10]Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, cet ke-1, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 4.

[11]Lawrence, Kincaid, D. and Wilbrum Schramm, *Asas-asas Komunikasi Antar Manusia*, eds. Ketujuh, (diterjemahkan oleh Agus Setiadi), Hawai: West Communication Institute, 1987, hlm. 55.

menyatakan bahwa tanpa komunikasi kehidupan manusia tidak akan punya arti atau bahkan manusia tidak akan dapat bertahan lama.

Astrid S. Susanto menyatakan bahwa, proses komunikasi banyak disebut-sebut sebagai asal-muasal dari hampir semua permasalahan dalam organisasi tau badan usaha serta manajemen, tetapi pada umumnya kurang dipahami. Sebaliknya cukup disadari bahwa komunikasi yang efektif merupakan dasar utama untuk mencapai tujuan organisasi, walaupun komunikasi tetap merupakan masalah besar bagi organisasi.[12]

Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar dan salah, definisi harus dilihat dari kemanfaatan untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasi. Bisa saja definisi dinilai terlalu sempit, atau sebaliknya, dinilai terlalu luas.[13]

---

[12]Astrid S. Susanto, 1983. *Peranan Komunikasi dalam Perusahaan dan Organisasi.* Majalah Manajemen, No. 15 tahun III, edisi Maret-April, hlm. 37.

[13]Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h1m. 61.

3. Strategi Komunikasi

Berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi.[14] Strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi *(communication planning)* dengan manajemen komunikasi *(communication management)* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[15] Dari pandangan tersebut, terlihat bahwa langkah awal dalam menerapkan sebuah strategi komunikasi adalah menyusun perencanaan komunikasi.

Menurut Arifin dalam merumuskan strategi komunikasi ada lima faktor yang harus diperhatikan, yaitu:[16]

a. Pengenalan khalayak

Mengenal khalayak haruslah merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha komunikan yang efektif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif, sehingga antara komunikator dan

---

[14]Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi,* cet ke-1, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 35.

[15]Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,* cet. Ke-3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 32.

[16]Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*: *Sebuah Pengantar Ringkas*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 59-87.

komunikan bukan saja terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi, oleh komunikator tetapi komunikator juga dapat dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak.

Dalam proses komunikasi, baik komunikator maupun khalayak, mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa persamaan kepentingan, komunikasi tidak mungkin berlangsung. Justru itu, untuk berlangsungnya suatu komunikasi dan kemudian tercapainya hasil yang positif, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama dalam pesan, metode dan media. Untuk menciptakan persamaan kepentingan tersebut, maka komunikator harus mengerti dan memahami kerangka pengalaman dan kerangka referensi khalayak secara tepat dan seksama, yang meliputi:

a) Kondisi kepribadian dan kondisi fisik khalayak.
b) Pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan norma-norma kelompok dan masyarakat yang ada.
c) Situasi dimana khalayak itu berada.

b. Penyusunan Pesan

Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya dalam perumusan strategi komunikasi, ialah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah mampu

membangkitkan perhatian. Dalam saat yang bersamaan, kadang-kadang dirangsang oleh banyak pesan dari berbagai sumber. Tetapi tidaklah rangsangan itu dapat mempengaruhi khalayak, justru karena tidak semuanya dapat diproses menjadi milik rohani.

Sesuatu yang menjadi milik rohani, haruslah terlebih dahulu melalui pintu perhatian, setelah melewati panca-indera dan menjadi pengamatan. Perhatian ialah pengamanan yang terpusat. Karena itu tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian. Dengan demikian awal dari suatu efektivitas dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan.

c. Penetapan Metode

Untuk mencapai efektivitas dari suatu komunikasi selain akan tergantung dari kemantapan isi pesan, yang diselaraskan dengan kondisi khalayak dan sebagainya, maka juga akan turut dipengaruhi oleh metode-metode penyampaiannya kepada sasaran. Dalam dunia komunikasi pada metode penyampaian/mempengaruhi itu dapat dilihat dari dua aspek yaitu: manurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya.

Hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa yang pertama, semata-mata melihat komunikasi itu dari segi pelaksanaannya

dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Sedangkan yang kedua, melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Oleh karena itu yang pertama (menurut cara pelaksanaannya), dapat diwujudkan dalam dua bektuk, yaitu metode Redundancy (repetition) dan Canalizing. Sedangkan yang kedua (menurut bentuk isinya) dikenal metode-metode: informatif, persuasif, edukatif, dan kursif.

d. Pemilihan Media

Pemilihan media sebagai alat penyalur idea. Dalam rangka merabut pengaruh dalam masyarakat, adalah suatu hal yang merupakan keharusan. Sebab selain media massa dapat menjangkau jumlah besar khalayak, dewasa ini rasanya tidak dapat lagi hidup tanpa surat kabar, radio, film, dan mungkin juga televisi. Dan agaknya alat-alat itu kini betul-betul telah muncul sebagai alat komunikasi massa yang sejati yang selain berfungsi sebagai alat penyalur, juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks.

Sebagaimana dalam menyusun pesan dari suatu komunikasi yang ingin dilancarkan, kita harus selektif, dalam arti menyesuaikan keadaan dan kondisi khalayak, maka dengan sendirinya dalam penggunaan media pun, harus demikian pula. Justru itu selain kita harus berfikir dalam jalinan faktor-faktor komunikasi sendiri juga

harus dalam hubungannya dengan situasi sosial-psikologis, harus diperhitungkan pula. Hal ini karena masing-masing media tersebut mempunyai kemampuan dan kelemahan-kelemahannya serta dengan kaitannya dengan tuntutan sosial-psikologis dari audience.

e. Peranan Komunikator

Akhirnya unsur yang paling dominan dalam keseluruhan proses komunikasi untuk mencapai efektivitas adalah komunikator. Yaitu mereka yang menyusun dan melontar pesan atau pernyataan umum kepada khalayak. Kedudukan dan fungsi komunikator dalam upaya menciptakan efektivitas dalam proses komunikasi adalah penting sekali, karena daripadanya terletak efektif tidaknya pesan-pesan yang disampaikan.

Sebenarnya apa yang diuraikan di muka, keseluruhannya merupakan bahan bagi komunikator dalam menciptakan efektivitas bagi pesan yang dilontarkan. Telah dijelaskan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dipersiapkan. Persiapan dalam arti membuat perencaan dan strategi itu, adalah tugas dan fungsi komunikator. Hal ini dapat dilakukan, dalam suatu team atau organisasi, seperti dalam public relations dan penerangan suatu lembaga atau instansi atau perusahaan.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah pendekatan sistemetis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberi makna atasnya.[17]

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.[18] Secara sederhana metodologi penelitian adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dengan jalan cara-cara penelitian terhadap objek yang dihadapi. Langkah-langkah yang diambil dalam metodologi penelitian antara lain:

---

[17]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 32.

[18]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.[19]

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda gerak, atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedang obyek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah obyek penelitian atau variabel penelitian.[20]

2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[19]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-9, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

[20]*Ibid.,*

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan.[21] Wawancara sering juga disebut dengan *interview* atau kuesioner lisan adalah dialog yang digunakan oleh pewawancara *(interviewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara *(interviewee).* Wawancara di sini ditujukan kepada Prof Dr. H. Irwan Abdullah, Drs. H. Ismail Thaeb, Drs. H. Abdul Ra'uf Sabi, guna memperoleh data langsung tentang strategi komunikasi apa yang digunakan dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta. Agar tidak menyimpang dari persoalan penelitian maka digunakan interview bebas terpimpin, *interviewer* membawa kerangka pertanyaan *(Frame Work of Quetion)* untuk disajikan, dengan tujuan sistematika pertanyaan yang diinginkannya, dalam kerangka pertanyaan itu *interviewer* mempunyai kebebasan untuk menggali alasan-alasan dan dorongan-dorongan dengan pembicaraan yang tidak kaku, dengan begitu *interviewer* dengan leluasa meminta keterangan tentang keobjektifan sesuatu yang diteliti.

[21]Rachmat Kriyantoro, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 99.

b. Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subyek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.[22]

c. Metode Dokumentasi

Sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data dan informasi melalui metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

[22]M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 165.

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[23] Yang menyangkut Strategi Komunikasi dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakartas, yang peneliti angkat dalam judul skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, interview, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.[24] Ringkasnya, analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[25]

Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam pengolahan dan analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptis analitis. Sebagai bagian dari penelitian kualititatif, penelitian akan dianalisis secara

---

[23]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-9, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 131.

[24]Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 66.

[25]Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei (*Jakarta : LP3ES, 1987), hlm. 263.

induktif yaitu mencatat, menguraikan, dan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diteliti.[26]

Setelah data dikumpulkan, lalu diolah dengan dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan kerangka penelitian dan selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis yang digunakan adalah deskriptis analitis, bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang baik diantaranya harus disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam memahami isi skripsi tersebut. Adapun sistematika pembahasan pada skrpisi ini diawali dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Selanjutnya diikuti oleh empat bab dimana setiap bab terdapat beberapa sub bab.

Bab ***pertama***, berisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika

[26]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, cet-II (Bandung : Rosda Karya, 2003), hlm. 122.

Pembahasan. Bab ini merupakan rujukan dasar untuk penelitian dan penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab ***kedua***, akan membahas tentang Profil Majelis Adat Aceh (MAA) di Yogyakarta. Dalam bab ini ada 5 hal yang di cantumkan. (a). Sejarah berdirinya Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta, (b). Visi dan Misi Organisasi Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta, (c). Struktur Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta, (d). Program dan Kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta, (e). Tantangan Majelis Adat Aceh Yogyakarta Kedepan.

Bab ***ketiga***, merupakan bagian yang sangat penting berupa isi penelitian berupa pembahasan tentang Strategi Komunikasi dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta. Adapun isi pembahasan dalam bab ini adalah: (a). Pengenalan Khalayak, (b). Penyusunan Pesan, (c). Metode Penyampaian Pesan (d). Media Komunikasa yang digunakan, (e). Aktor dan Peranannya dalam Pewarisan.

Bab ***keempat***, merupakan bab Penutup yang terdiri dari sub bab. Berisi Kesimpulan, Saran serta Kritik yang perlu disampaikan yang tentunya relevan, dan kata Penutup. Terlampir Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini berbicara mengenai strategi komunikasi yang dilakukan Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta terkait pewarisan nilai-nilai budaya Aceh. Dalam kajian ini, strategi komunukasi diartikan sebagai kegiatan yang layak dikerjakan untuk melancarkan komunikasi. Adapun MAA sendiri merupakan sebuah lembaga adat yang memiliki wewenang untuk mengurus masalah adat masyarakat Aceh yang berada di Yogyakarta. Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta merupakan bagian atau perwakilan Majelis Adat Aceh (MAA) pusat yang berada di Banda Aceh. Strategi komunikasi terkait pewarisan nilai-nilai budaya Aceh di Yogyakarta yaitu:

1. Sasaran utama para generasi muda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar asal Aceh yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta saat ini. Alasan mereka dijadikan sasaran utama adalah karena mereka dianggap sebagai generasi yang akan mewariskan nilai-nilai budaya Aceh ke depan kepada generasi beikutnya dan atas pertimbangan bahwa mereka kelompok yang paling sedikit bersentuhan dengan adat dan nilai-nilai budaya Aceh. Selain itu, mereka juga sebagai

kelompok yang rentan terhadap pengaruh budaya luar, terutama budaya modern saat ini atau yang lebih dikenal dengan budaya pop.

2. Pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi budaya ini adalah bahwa adat di Aceh tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap praktik adat yang dilakukan haruslah bersendikan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Agama adalah dasar dari nilai-nilai budaya Aceh, apa yang disebut sebagai *good of contact*. Jadi etika-etika sosial dan sebagainya, semua berasal dari Islam. Nilai yang dikatakan dalam masyarakat Aceh itu bersifat adat, seperti yang dikatakan dalam Narid Maja: *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*. Selain itu, antara agama dan adat ini juga diibaratkan melalui ungkapan *"agama ngon adat lagee zat ngon sifeut"*, yang artinya antara agama dan adat seperti zat (Allah SWT) dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
3. Pesan-pesan yang berisi nilai-nilai budaya Aceh tersebut disampaikan dalam forum-forum dialog, baik yang bersifat formal maupun informal, ceramah, pengajian, maupun secara sederhana, misalnya obrolan-obrolan santai. Diharapkan dengan cara seperti itu dan tidak bersifat terlalu formal pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat

dengan mudah diterima oleh kalangan muda. Selain itu, pementasa kesenian Aceh, seperti tarian saman, seudati, rapai geleng juga meruapakan salah satu cara *transfer of knowledge* karena melalui syair-syair dan gerakan yang penuh makna dapat dipraktikkan langsung oleh setiap kalangan muda ini. Untuk itu, keterlibatan mereka dalam acara-acara kesenian seperti itu juga ikut membantu proses pewarisan nilai-nilai budaya Aceh kepada kalangan muda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar yang ada di Yogyakarta ini.

4. Media komunukasi yang digunakan dalam pewarisan nilai yang ditempuh oleh Majelis Adat Aceh (MAA) itu agak konvensional. Tokoh-tokoh Majelis Adat Aceh (MAA) sudah menterjemahkan naskah-naskah yang ditulis dengan bahasa Arab-jawi, dan seperti hikayat perang sabi, yang ditemukan naskah-naskah kuno. Melalui terjemahan naskah-naskah tersebut, dan juga penerbitannya itu diharapkan menjadi media komunikasi dalam pewarisan nilai.
5. Tidak hanya tokoh-tokoh tua yang memiliki posisi dan jabatan yang tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam proses *transfer of knowledge* ini, selayaknya semua orang, terutama generasi tua yang lain memiliki tanggung jawab dalam proses pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda ini, sehingga tugas mewariskan nilai-nilai budaya dan tradisi berada di pundak setiap orang, terutama para

kaum generasi tua, baik yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi maupun orang biasa karena sudah menjadi bagi setiap orang Aceh untuk saling berbagi kepada sesama, khususnya pengetahuan tentang nilai-nilai budaya dan tradisi Aceh.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil kajian ini, di antaranya adalah:

1. Sebagai landasan keilmuan dalam memahami strategi komunikasi. Terkait pewarisan nilai-nilai budaya perlu dilakukan mengingat begitu banyak tradisi dan nilai-nilai budaya yang sudah memudar saat ini terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, bagi pelaksana tanggung jawab dalam pewarisan nilai-nilai budaya dapat mengambil langkah nyata seperti yang telah dilakukan oleh lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) ini.
2. Diperlukan kajian-kajian strategi komunikasi seperti ini untuk ke depan mengingat komunikasi apapun akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan jika strategi-strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk itu diharapkan hasil kajian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagi studi-studi sejenis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum,* cet, I, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Ali Murtopo, *Stategi Kebudayaan,* Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1978.

Anwar Arifin, Strategi Komunikasi: *Sebuah Pengantar Ringkas*, Bandung: Armico, 1984.

Astrid S Susanto, *Komunikasi Tiori dan Praktek,* Jakarta: Gramedia, 1978.

Badruzzaman Ismail dkk., *Masa Bakti Pengurus Majelis Adat Aceh,* Banda Aceh: Sekretariat MAA, 2003.

Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Irwan Abdullah, *Kontruksi dan reproduksi kebudayaan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama,* cet-II, Bandung: Rosda Karya, 2003.

Lawrence, Kincaid, D. and Wilbrum Schramm, *Asas-asas Komunikasi Antar Manusia,* eds. Ketujuh, (diterjemahkan oleh Agus Setiadi), Hawai: West Communication Institute, 1987.

Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1998.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1987.

M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, cet ke-1, Bandung: Remadja Karya, 1986.

----------, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, cet. Ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I, Jakarta: Moder English Press, 1991.

Rachmat Kriyantoro, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sadilah Emiliana, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan Dan Perilaku Dikalangan Genarasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan tradisional Di kota Semarang Jawa Tengah*, Yogyakarta: Badan pengembangan kebudayaan dan Pariwisata, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

B. Laporan Penelitian dan Makalah

Ahmad Rais. *Strategi Komunikasi Tim Kampanye Capres-Cawapres: Studi Kasus Strategi Komunikasi Tim Kampanye Amin-Siswono Dalam Membangun Citra Pasangan Amien Rais- Siswono Yudohusodo Pada Pemilu Presiden 2004*, Yogyakarta: Fisipol UGM. 2000.

Kasman, *Strategi Komunikasi Relawan Dengan Mahasiswa Difabel di Lingkungan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2012.

Lamin Budiarso, *Strategi Komunikasi Dana Sosial Rumah Zakat Indonesia DSUQ Cabang Yogyakarta,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 1999.

Susiana Dewi Wulandari. *Strategi Komunikasi Dakwah Panti Asuhan Mabarrot Srimartani Piyungan Bantul Dalam Membina Akhlak Karimah Anak Asuh,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2000.

C. Internet

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179905-pengertian-program-kerja/#ixzz2Xy9LfZh0, akses 03 Juli 2013.

PengertianStrukturOrganisasi,*http://ensikopedi.blogspot.com/2013/02/pengertian-struktur-organisasi_28.html,* akses 12 Juni 2013.

PengertianTantangan,*http://perdatorjugamanusia.blogspot.com/2011/04/pengertian-tantangan.html,* akses 12 Juni 2013.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan/ Interview Guide
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Sertifikat Pratikum Media
4. Sertifikat KKN
5. Sertifikat ICT
6. Sertifikat IKLA Bahasa Arab
7. Sertifikat TOEC Bahasa Inggris
8. Kartu Bimbingan Skripsi
9. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
10. Surat Izin Penelitian dari Provinsi D. I. Y
11. Foto – Foto kegiatan Majelis Adat Aceh (MAA) Yogyakarta
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004

INTERVIEW GUIDE

(Untuk Ketua Majelis Adat Aceh Yogyakarta)

1. Siapa saja Khalayak yang Bapak pilih dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
2. Bagaimana cara pemilihan tema dalam menyampaikan pesan menyangkut Pewarisan Buyada Aceh di Yogyakarta?
3. Siapa-siapa saja yang menentukan tema?
4. Bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan pengurus-pengurus yang lain dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
5. Bapak selaku Ketua MAA Yogyakarta, metode apa yang Bapak gunakan dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
6. Media komunikasi apa yang Bapak gunakan dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
7. Siapa-siapa saja orang yang terlibat dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
8. Apa peran Bapak dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
9. Apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam berkomunikasi dengan para Pengurus yang lain menyangkut Pewarisan Budaya Aceh?
10. Sejauh mana langkah yang Bapak gunakan dalam menghadapi kendala tersebut?
11. Apakah Bapak selaku Ketua MAA Yogyakarta, merasa sudah berhasil dalam menjalankan tugas sebagai Ketua, menyangkut Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
12. Program apa yang paling berhasil? Kenapa program tersebut berhasil?
13. Program apa yang gagal? Kenapa program tersebut gagal?

INTERVIEW GUIDE

(Untuk Pengurus Majelis Adat Aceh Yogyakarta)

1. Siapa saja Khalayak yang Bapak pilih dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
2. Bagaimana cara pemilihan tema dalam menyampaikan pesan menyangkut Pewarisan Buyada Aceh di Yogyakarta?
3. Siapa-siapa saja yang menentukan tema?
4. Media komunikasi apa yang Bapak gunakan dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
5. Siapa-siapa saja orang yang terlibat dalam Pewarisan Budaya Aceh di Yogyakarta?
6. Program apa yang paling berhasil? Kenapa program tersebut berhasil?
7. Program apa yang gagal? Kenapa program tersebut gagal?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Munzirwan

Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 10 Desember 1984

Alamat : Jl. Pendidikan, Kab. Bireuen, Prov. Aceh.

Email : mz_bireuen@yahoo.com

Nama Ayah : Zakaria Ajad

Nama Ibu : Faridah Usman

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 6 Bireuen : 1992 - 1998

SMP Negeri 3 Bireuen : 1998 - 2001

Madrasah Ulumul Qur'an Langsa : 2001 - 2004

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2005 Sampai sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PRAMUKA di Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Langsa Aceh Timur Tahun 2002 s/d 2004.
2. Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Kab. Langsa Prov. Aceh 2002 s/d 2003
3. Anggota Keluarga Alumni Bustanul Ulum Langsa Aceh Timur (KABULAT) Yogyakarta 2005 s/d sekarang
4. Anggota Solidaritas Aceh Papua (SAP) Yogyakarta 2004 s/d 2006
5. Anggota Ikatan Mahasiswa Korban Dom Aceh (IMKDA) Yogyakarta 2005 s/d 2008

6. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta 2005 s/d 2007
7. Koordinator Hubungan Antar Lembaga Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang (PERMATA) Yogyakarta 2007 s/d 2009
8. Ketua Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta 2010 s/d 2012.
9. Ketua Masyarakat Aceh Peduli Yogyakarta (MARAPY) 2010 s/d 2011
10. Dewan Presidium Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nasional (KMPAN) 2010 s/d 2012
11. Dewan Perwakilan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia di Yogyakarta (IKPMDI) 2010 s/d 2012.
12. Anggota Himpunan Masyarakat Aceh (HIMA) Yogyakarta 2013

D. Pengalaman Kerja

1. Staf Administrasi di Komite Kemanusian Aceh (KKA) 2004 s/d 2005
2. Koordinator Pendampingan Belajar Anak (PBA) di Komite Yogyakarta Untuk Pemulihan Aceh (KYPA) 2005 s/d 2009.
3. Asisten Prof. Dr. H. Irwan Abdullah 2011 s/d sekarang.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Munzirwan

Foto. 1.
Sekretariat Majelis Adat Aceh Yogyakarta

Foto. 2.
Pelantikan dan Peusijuk Pengurus HIMA oleh Majelis Adat Aceh Yogyakarta

Foto. 3.
Diskusi dengan Dewan Pembina Majelis Adat Aceh Yogyakarta

Foto. 4.
Seminar Kebudayaan Aceh yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh Yogyakarta

Foto. 5.
Pidato Ketua Mejelis Adat Aceh Yogyakarta
Dalam Acara Pembukaan Seni Budaya Aceh Untuk Indonesia

Foto. 6.
Tarian Rapai Geleng

Foto. 7.
Peusijuk Pengurus Taman Pelajar Aceh oleh Majelis Adat Aceh Yogyakarta

Foto. 8.
Tarian Tarek Pukat

Foto. 9.
Mahasiswa Aceh diskusi Budaya dengan Ketua Mejelis Adat Aceh Yogyakarta

Foto. 10.
Peringatan 8 Tahun Tsunami Aceh di Yogyakarta dan do'a bersama yang diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh Yogyakarta

QANUN

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MAJELIS ADAT ACEH

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa Adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat Aceh;

b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga di bentuk Majelis Adat Aceh;

c. bahwa berdasarkan hasil Kongres Adat Aceh tanggal 25 s /d 27 September 2002 di Banda Aceh disepakati bahwa Lembaga Adat Aceh dan Kebudayaan Aceh (LAKA) diubah namanya menjadi Majelis Adat Aceh (MAA);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Qanun

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah

Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1991 Nomor 13);

6. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194);
7. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 35);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

d a n

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan QANUN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

(1). Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2). Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(3). Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(4). Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota,dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(5). Camat adalah Camat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(6). Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.

(7). Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Provinsi.

(8). S. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.

(9). Imum Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.

(10). Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

(11). Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.

(12). Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(13). Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.

(14). Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang.

(15). Peradilan Adat Gampong adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dengan anggota tengku meunasah dan para TuhaPeut Gampong,

(16). Peradilan Adat Mukim adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum. Syik dan para Tuha Peuet Mukim

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Majelis Adat Aceh Provinsi dibentuk oleh Gubernur berkedudukan di Ibu kota Provinsi.

(2). Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

(3). Majelis Adat Aceh Perwakilan dibentuk oleh Majelis Adat Aceh Provinsi berkedudukan di tempat masyarakat Perwakilan berada.

4). Di ibukota Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk MAA oleh Camat.

(5). Majelis Adat Mukim dan Gampong dibentuk oleh Bupati/Walikota berkedudukan di Mukim dan Gampong masing-masing.

Pasal 3

Majelis Adat Aceh mempunyai wewenang :

a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;

b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat;

c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Pasal 4

Majelis Adat Aceh adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan Adat.

Pasal 5

MAA Provinsi, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan, MAA Kecamatan, MAA Kemukiman, dan MAA Gampong mempunyai fungsi :

a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Daerah;
c. meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureja udep dan keureja mate, penampilan kreativitas, dan massa media.
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim;
e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundangundangan yang berlaku;
g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
h. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan "ADAT BAK POUTEUMEREUHOM, HUKOM BAK SYIAH KUALA, QANUN BAK PUTRO PHANG, RESAM BAK LAKSAMANA".

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1). Struktur organisasi MAA Pusat terdiri dari :

a. Majelis Pemangku Adat;

b. pengurus.

Pasal 7

(1). Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.

(2). Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung, jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretaris/Sekretariat dan bidang-bidang.

Pasal 8

(1). Majelis Pemangku Adat terdiri dari :

a. Wali Nanggroe;

b. Tuha Nanggroe;

(2). Pengurus terdiri dari :

a. Ketua	1 orang
b. Wakil Ketua	2 orang
c. Sekretaris	1 orang
d. Wakil Sekretaris	1 orang
e. Bendahara	1 orang

f. Para Ketua bidang 5 orang

(3). Sekretariat, yang terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat

b. Ka Sub Bag. Umum

c. Ka Sub Bag Keuangan

d. Ka Sub Bag Sarana dan Perlengkapan

e. Ka Sub Bag Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan

(4). Bidang-bidang terdiri dari :

a. Bidang Hukum Adat;

b. Bidang Adat Istiadat;

c. Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;

d. Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat;

e. Pemberdayaan "Putroe Phang"

(5). Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh satu orang ketua dengan tiga orang anggota.

Pasal 9

Susunan Pengurus MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan disesuaikan menurut kebutuhan. masing-masing Daerah/Perwakilan.

Pasal 10

(1). Mubes MAA Provinsi diadakan 5 (lima) tahun sekali.

(2). Mubes bertugas :

a. memilih dan menetapkan Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun;

b. memilih dan menetapkan Tuha Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun,

c. memilih dan menetapkan Pengurus MAA Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun;

d. membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

(3). Musyawarah MAA Kabupaten/Kota diadakan 4 (empat) tahun sekali dan bertugas :

a. memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten/Kota untuk masa bakti 4 (empat) tahun;

b. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten/Kota.

(4). Musyawarah Majelis Adat Kecamatan diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan bertugas :

a. memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun;

b. menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Kecamatan;

(5). Musyawarah Majelis Adat Mukim diadakan 2 (dua) tahun sekali dan bertugas :

a. memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Mukim untuk masa bakti 2 (dua) tahun;

b. menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Mukim.

(6). Musyawarah Majelis Adat Gampong diadakan 2 (dua) tahun sekali dan bertugas:

a. memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Gampong untuk masa bakti 2 (dua) tahun;

b. menyusun dan membahas rencana kerja Majelis Adat Gampong.

Pasal 11

(1). Pengurus MAA Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Mubes.

(2). Pengurus MAA Kabupaten/Kota dipi l ih dan ditetapkan oleh Musyawarah MAA Kabupaten/Kota.

(3). Pengurus MAA Perwakilan dipilih oleh Musyawarah masyarakat perwakilan dan dikukuhkan oleh MAA Provinsi.

(4). Pengurus Majelis Adat Mukim dipilih oleh Musyawarah Mukim.

(5). Pengurus Majelis Adat Gampong dipilih oleh Musyawarah Gampong.

Pasal 12

(1). Peserta Mubes terdiri dari :

a. Wali Nanggroe;

b. Tuha Nanggroe;

c. Pengurus dan Anggota MAA Provinsi;

d. Utusan MAA Perwakilan;

e. Utusan-utusan MAA Kabupaten/Kota;

f. Ahli Adat Aceh;

(2). Peserta Musyawarah MAA Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pengurus dan Anggota MAA Kabupaten/Kota; Pengurus

b. Utusan Majelis Adat Mukim;

c. Para Ahli Adat setempat.

d. Peserta Musyawarah Majelis Adat Gampong adalah Keuchik, Tengku dan Tuha Gampong.

BAB IV

PEMBIAYAAN

P a s a l 13

Dana untuk MAA bersumber dari :

a. APBD. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk MAA Provinsi.

b. APBD Kabupaten/Kota untuk MAA Kabupaten/Kota, Majelis Adat Mukim dan Majelis Adat Gampong.

c. Bantuan Pemerintah Pusat.

d. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

e. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus MAA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1). Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2). Segala aset dan keuangan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Segala keuangan menjadi aset dan keuangan Majelis Adat Aceh (MAA)

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1). Pada saat Qanun ini ditetapkan semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 M a r e t 2004
18 Muharam 1425

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 M a r e t 2004
19 Muharram 1425

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI D NOMOR 5

PENJELASAN

A T A S

QANUN PROVINS I NANGGROE ACEH DARUSSALAM

N O M O R 3 T A H U N 2 0 0 4

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. PENJELASAN UMUM

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bidang adat merupakan salah satu keistimewaan yang diakui oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan pengembangan adat istiadat di tingkat Desa/Kelurahan, pengaturan masalah lembaga adat telah mempunyai landasan hukum yang konkret. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat mengatur pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan hukum adat.

Fungsi umum adat istiadat dan hukum adat adalah mewujudkan hubungan yang harmonis dan penataan tertib hukum bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat

berlandaskan kepada. "Adat Bak Poeteumereuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana".

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehidupan adat dan hukum adat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Perwakilan MAA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Perwakilan Kepengurusan MAA yang dibentuk oleh komunitas masyarakat Aceh yang berdomisili di Provinsi-provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kongres adalah suatu forum musyawarah besar yang dihadiri oleh Majelis Pemangku Adat, Dewan Pengurus, Ahli Adat Aceh dan utusan-utusan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan yang diadakan di Banda Aceh atau di tempat lain sesuai dengan keadaan dan kemampuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

P a s a l 1 2

Cukup Jelas

P a s a l 1 3

Cukup Jelas

Pasal 14

Pengelolaan keuangan, dimaksudkan untuk ketertiban/kelancaran dan memudahkan tanggung jawab, sebagai badan/lembaga otonom penyelenggaraan keistimewaan Aceh bidang adat istiadat dan hukum adat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi yang diembannya.

P a s a l 1 5

Cukup Jelas

P a s a l 1 6

Cukup Jelas

P a s a l 1 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 32.